

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Riset ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor dibalik hambatan pemenuhan tuntutan masyarakat Thailand kepada pemerintah Thailand. Dengan segala pergerakan politik yang terjadi setelah Revolusi Siam tahun 1932, kelahiran kelompok-kelompok sosial seperti gerakan pro-demokrasi, pro-militer, pro-royalis, gerakan anti pemerintah, dan munculnya 13 kudeta militer dari tahun 1932-2014 secara tidak langsung menjadi paradoks baru dalam dinamika politik Thailand.

Selain keputusannya untuk menciptakan amandemen baru yang memberi ruang lebih besar untuk militer berkuasa, ketidakpuasan rakyat dengan cara Raja Vajiralongkorn memimpin Thailand juga bertambah. Rakyat merasa dibatasi dan dibungkam, dengan adanya hukum *Lèse-majesté* yang terdapat dalam artikel 112 Hukum Pidana Thailand yang melarang rakyat untuk mengkritik Raja, Ratu, dan Putra Mahkota. Oleh karena itu, bagian ini begitu penting untuk diteliti guna menemukan berbagai bentuk halangan keberhasilan pemenuhan tuntutan rakyat agar terlaksananya reformasi monarki maupun rekonstitusi demokrasi yang sudah bertahun-tahun disuarakan rakyat Thailand.

Melalui berbagai macam dinamika politik yang terjadi di dalamnya, saat ini Monarki Konstitusional masih menempati kedudukan tertinggi sebagai tatanan kekuasaan Thailand yang tentunya tidak lepas dari sejarah panjang pembentukan sistem pemerintahan negara yang dulunya dikenal dengan nama Siam ini. Thailand adalah salah satu negara demokrasi tertua di Asia Tenggara. Dengan diperkenalkannya politik demokrasi pada tahun 1970-an, Thailand menjadi negara demokrasi kedua di kawasan itu, setelah Filipina (Round et al. 2002).

Menurut laporan Reza Wirananto Gunarso (2013), mengutip dari tulisan R. Siti Zuhro (1995), Thailand tidak pernah dilewati oleh negara-negara barat untuk dijajah. Maka dari itu, Thailand mempelajari penjajahan yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara untuk mengaplikasikan sistem pemerintahan modern di Thailand. Secara tidak langsung hal ini membawa Thailand melewati masa-masa kudeta di tahun 1932 demi menjatuhkan pemerintahan monarki absolut dan menetapkan konstitusi demokrasi selaku sistem pemerintahan.

Seiring dengan perjalanan dunia modern ini, fundamental ekonomi Thailand yang cukup kuat mampu mendorong negara ini berhasil memberikan pengaruh yang besar bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Dikutip dari *London Post* (2020), Thailand menempati posisi kedua pada peringkat negara terbaik 2020 untuk berinvestasi. Krisis Keuangan Asia tahun 1997 yang bersumber dari Thailand memberikan pelajaran besar kepada para pemimpin politiknya.

Mereka mengarahkan ekonomi keluar dari krisis utang negara global pada tahun 2009, membuat ekonomi negaranya relatif aman. Setelah kudeta militer tahun 1932 yang dipimpin keempat perwira militer yang dikenal sebagai “*Four Musketeers*”, Thailand mengalami konflik politik yang cukup besar. Lanskap politik Thailand juga belum begitu baik dalam mengembangkan alat konseptual dan teoritis untuk memahami peristiwa beberapa tahun terakhir atau perdebatan lama tentang bentuk representasi demokrasi di Thailand (Ferrara, 2015).

Mulai dari kudeta militer yang masih bisa dirasakan ditengah dunia modern ini, pergantian Perdana Menteri yang dilakukan secara demokratis maupun secara paksa, kontestasi besar oleh partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan rakyat melalui politik uang, sampai puluhan kematian akibat kekerasan politik yang dilakukan oleh militer. Kejadian ini semakin terasa semenjak militer Thailand mengambil alih kekuasaan sipil pada tahun 2014 melalui kudeta, dan banyak orang telah dihukum dengan hukuman penjara yang berat.

Kritikus mengatakan pemerintah didukung militer menggunakan undang-undang *Lèse-majesté* untuk menekan kebebasan berbicara rakyat Thailand. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) telah berulang kali meminta Thailand untuk mengubahnya. Tetapi pemerintah mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk melindungi monarki, yang secara luas dihormati di Thailand (BBC, 2017). Sejak kudeta 22 Mei 2014, rakyat Thailand dipaksa hidup di bawah kendali pemerintahan junta (diktator militer).

Pemerintah militer telah menggunakan kekuatan negara yang ekstrem dan tak terbantahkan untuk membungkam dan mengendalikan rakyat Thailand selama 6 tahun terakhir. Berbagai kelompok sosial seperti gerakan pro-demokrasi dan kelompok anti-militer akhirnya menolak untuk mentolerir kekejaman militer lebih lama lagi. Aktivis dan mahasiswa pemberani yang bergerak untuk menyuarakan kritik mereka yang sah terhadap junta menghadapi konsekuensi yang mengerikan seperti seorang Wanita berumur 65 tahun yang secara mengejutkan ditangkap tahun 2015 karena dianggap telah melecehkan monarki (Article19, 2021).

Kebebasan berbicara dan hak asasi rakyat yang dicuri akibat perbedaan pendapat dengan pemerintah akhirnya menegakkan sensor media untuk maju bersama rakyat dan berperang dengan kekuatan militer yang bersinergi dengan kerajaan. Konstitusi saat ini, yang dirancang di bawah pengaruh besar militer dan diberlakukan pada tahun 2017, memungkinkan otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan berkembang lebih jauh dengan mengorbankan kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Thailand.

Hukum dan sistem peradilan yang banyak dikorupsi telah dipersenjawai oleh militer untuk melayani kelas penguasa dan menghancurkan mereka yang kurang beruntung. Dimulai dari kecaman ribuan orang yang turun ke jalan pada tanggal 14 Desember 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum di Thailand mengadakan sesi pemungutan suara untuk membubarkan FFP (*Future Forward Party*) yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Pemilu di Thailand (Medcom.id, 2019).

Didirikan pada tahun 2018, FFP, yang notabene adalah sebuah partai pro-demokrasi anti-militer, mengejutkan para petinggi Thailand dengan menempati posisi ketiga dalam pemilihan kontroversial bulan Maret 2019 di mana Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin pemerintahan militer, kembali berkuasa sebagai perdana menteri sipil. FFP dengan cepat menjadi populer, menarik pemilih dengan sikap pro-demokrasi dan anti-korupsi yang kuat serta keengganan partai untuk terlibat dalam politik "gaya lama", seperti pembelian suara dan mengandalkan tokoh terkemuka lokal (Washington Post, 2021).

Mereka menyerukan agar pemerintah segera menyingkirkan kediktatoran dan membiarkan demokrasi hidup. Beberapa analisis politik beropini bahwa pembubaran FFP didorong oleh faktor ketakutan PM Prayuth terhadap Thanathorn Juangroongruangkit, ketua FFP, dan partainya. Dikutip dari tulisan *Al Jazeera* (2019), FFP dianggap menerima dana pinjaman ilegal karena mendapatkan dana tersebut dari tabungan pribadi miliknya.

Para demonstran menuntut agar ancaman pemerintah untuk membubarkan Phak Anahot Mai atau dikenal sebagai partai *Future Forward Party* secepatnya dicabut. Dengan tingkat partisipasi 51,2 juta penduduk (Kabar24, 2019), pesta demokrasi ini juga disebut menjadi pemilu pertama sejak kudeta besar tahun 2014. Pendukung FFP menuduh pemilihan itu curang dan palsu (*Al Jazeera*, 2019,). Pasalnya, partai politik yang dipimpin oleh Thaksin selalu memenangkan Pemilu Thailand dari tahun 2001.

Oleh sebab itu, banyak rakyat dan partai oponen yang merasa adanya keganjilan serta kurangnya transparansi dari pihak Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC). Kejadian ini banyak melahirkan kecurigaan dari berbagai belah pihak. Tak hanya rakyat yang mengelukan rasa kurang percayanya, para kritikus juga menilai bahwa kejadian ini dirancang oleh pihak militer, khususnya partai politik Prayuth Chan-Ocha, dengan visi dan misi yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan militer dalam ranah politik (BBC, 2019).

Sampai akhirnya mahkamah konstitusi Thailand memutuskan untuk membubarkan partai FFP pada akhir bulan Februari 2020 dengan gugatan yang sama yang dilontarkan pada bulan Desember 2019. FFP akhirnya menjadi partai ke-4 yang dibubarkan oleh pemerintahan militer dalam 13 tahun terakhir. Menurut Joel Selway dalam tulisannya "*Why Thailand's top court just dissolved a political party,*" yang diterbitkan di website Washington Post (2020), membubarkan FFP memungkinkan pemerintah yang berpihak pada militer untuk mencapai dua tujuan.

Pertama, mengirimkan sinyal kepada semua partai oposisi, terutama Pheu Thai, bahwa militer masih memegang kendali secara tegas; dan yang kedua, menekan ancaman pemilu yang hanya dapat tumbuh di masa depan, mengingat popularitas FFP di kalangan anak muda Thailand. Dari survey yang ia lakukan, hal ini menunjukkan popularitas yang dimiliki FFP dapat memotong basis dukungan konservatif tradisional yang telah menegakkan militer Thailand selama satu setengah dekade terakhir.

Melihat tanda-tanda munculnya penindasan, kebohongan di media, dan ketidakadilan di bawah pemerintahan pro-militer, ribuan pengunjuk rasa di Thailand turun ke jalan dan ke internet untuk menyerukan perubahan politik. Ditambah dengan pembubaran partai oposisi pendukung demokrasi, demo terbesar di Thailand semenjak kudeta tahun 2014 akhirnya pecah (Kompas, 2020). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peringatan yang melarang dilaksanakannya protes berskala besar, para pemuda Thailand tetap maju bersama untuk meluapkan amarah dan menuntut adanya perubahan.

Keadaan di Thailand tak kunjung membaik. Protes yang awalnya hanya di beberapa bagian wilayah Bangkok akhirnya semakin melebar seiring dengan waktu berjalan. Pada Juni 2020, kabar duka bagi para pejuang demokrasi kembali datang. Seorang aktivis pro-demokrasi, Wanchalearn Satsaksit yang sudah diasingkan di negara Kamboja semenjak kudeta tahun 2014 dikabarkan dihilangkan paksa dan dibunuh dibawah perintah pemerintahan militer di Thailand. Kejadian ini tertangkap di CCTV depan apartment yang ditinggali oleh Wanchanlearn (DW, 2020).

Organisasi HAM *Human Rights Watch* mengabarkan bahwa pemerintah Kamboja mengangkat tangannya dalam kasus ini. Mereka menolak untuk menginvestigasi kasus ini lebih jauh lagi (*ibid.*). Dikabarkan oleh Trtworld (2020) yang masih dilansir dari pernyataan HRW, Wanchalearn sudah mendapatkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada 2018 yang menuduh Wanchalearm melanggar

Undang-Undang Kejahatan Komputer dengan mengoperasikan halaman Facebook dari Phnom Penh yang mengkritik pemerintah Thailand. Mengutip tulisan *Thai Data Points* (2020), para pelajar, mahasiswa, dan para aktivis demokrasi yang berjuang bersama untuk melawan kepemimpinan militer, mulai dari Februari 2020 rutin mengadakan aksi unjuk rasa yang bisa diikuti oleh dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu masa yang dipimpin oleh pemuda dan pelajar Thailand terhadap pemerintah pro-militer yang berlangsung hampir setiap hari di setidaknya 55 dari 77 provinsi di seluruh negeri.

Demonstrasi yang rutin dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi telah menarik perhatian media selain menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Thailand, sebagian besar aktor dari aksi unjuk rasa yang dilakukan ditengah situasi pandemi Covid-19 adalah anak muda. Mereka kecewa dengan pemerintahan militer yang dianggap membungkam demokrasi dan tidak menunjukkan adanya kemajuan dalam pemerintahan.

Diawali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai oposisi FFP sampai ke pembelaan rakyat terhadap para aktivis pro-demokrasi yang dianggap dihilangkan secara paksa oleh kelompok militer, tuntutan rakyat kian lama kian bertambah. Para pengunjuk rasa menuntut adanya reformasi monarki di Thailand disusul dengan tuntutan pengunduran diri perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha dan perubahan konstitusi yang didominasi dan mendukung adanya peran militer yang besar dalam pemerintahan Thailand.

Bukannya memenuhi tuntutan rakyat, Prayuth Chan-Ocha justru menolak keras untuk turun dari jabatannya dan memiliki keinginan lain untuk mempersempit ruang demokrasi sembari membatasi berbagai bentuk kebebasan kepada warga sipil (dw, 2020). Rakyatpun tak kian mundur. Semenjak pertengahan Juli 2020, koalisi pemuda Thailand, *Free Youth Movement*, tak berhenti memimpin aksi unjuk rasa besar-besaran yang ikut dilancarkan oleh para aktivis dan mahasiswa Thailand yang menjadikan aksi protes tersebut sebagai aksi protes terbesar semenjak aksi kudeta militer tahun 2014. Film kedua *Hunger Games* yang dirilis di Thailand pada tahun 2014 - tahun yang sama dengan kudeta militer - dan penghormatan 'tiga jari' dari film tersebut menjadi simbol unjuk rasa bagi para pengunjuk rasa mahasiswa.

Dalam film-film tersebut, salut merupakan tanda perlawanan terhadap rezim. Para pengunjuk rasa menarik kesejajaran antara rezim otoriter fiksi film tersebut dan pemerintah militer Thailand, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), yang didirikan setelah kudeta tersebut. NCPO menggunakan kekuatan darurat untuk memberlakukan pembatasan hak asasi manusia selama bertahun-tahun termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai (Amnesty International, 2020). Dilansir dari Bangkok Post (2020), di luar penghormatan tiga jari, pengunjuk rasa memiliki tiga tuntutan tegas terhadap pemerintah.

Meski aksi protes beroperasi tanpa pemimpin tetap atau struktur tunggal, mereka yang awalnya turun ke jalan di Thailand umumnya menyetujui tiga tuntutan utama, yaitu; (1) membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru, (2) mereformasi monarki dan merevisi konstitusi yang dirancang militer, (3) mengakhiri intimidasi dan pelecehan terhadap kritikus pemerintah yang damai.

Para mahasiswa yang dipimpin oleh Gerakan Pemuda Merdeka (*Free Youth Movement*) bersatu didepan Monumen Demokrasi Bangkok pada Jumat malam tanggal 14 Agustus 2020 untuk menyerukan pembubaran parlemen yang diakhiri dengan pelecehan kritik pemerintah, dan untuk perubahan pada konstitusi yang didukung militer (Kompas, 2020). Mereka juga menyerukan reformasi pada monarki yang kuat dan kaya di negara itu, yang menurut mereka terlalu dekat dengan militer dan yang mereka tuduh mencampuri politik.

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka tidak menyerukan penghapusan monarki, tetapi untuk dimodernisasi. Tuntutan mereka membuat marah kaum royalis. Berbeda dengan unjuk rasa yang sering terjadi di Thailand sebelumnya, para aktivis demokrasi melakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Para pengunjuk rasa telah melakukan yang terbaik untuk menghindari pihak berwenang dan cenderung menggunakan media sosial untuk mengumpulkan pengikut sebelum polisi sempat memblokir mereka.

Walaupun pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap akun Twitter dan Facebook yang mengumumkan berbagai macam bentuk protes, mereka memilih untuk maju berjuang untuk masa depan negaranya. Para demonstran juga mengatakan sebuah konstitusi yang diundangkan di bawah pemerintahan militer dan disahkan dalam referendum di mana kampanye menentangnya merupakan sebuah tindakan ilegal adalah perilaku yang sangat tidak demokratis (Thailand Post, 2020).

Para demonstran juga tidak segan untuk menyentuh sakralitas kerajaan. Mereka menuntut adanya perubahan dalam hukum *Lèse-majesté* yang melindungi Raja dan keluarga kerajaan dari berbagai bentuk kritik. Disusul dengan 8 tuntutan lainnya, para pengunjuk rasa secara signifikan meningkatkan suhu politik di Thailand, membuat marah banyak orang tua konservatif Thailand yang menganggap setiap diskusi kritis tentang keluarga kerajaan sama dengan pengkhianatan.

Dinamika politik Thailand telah ramai menjadi perdebatan dalam tujuh tahun terakhir. Dengan gelombang politik yang kontroversial, protes jalanan yang besar dan panjang, serta tindakan militer yang dianggap menjadi ancaman oleh rakyat Thailand selama tujuh tahun terakhir, negara tersebut telah berubah dari demokrasi elektoral yang tadinya terlihat menjanjikan menjadi kediktatoran militer. Kudeta militer, gerakan pro-demokrasi, dan gerakan anti pemerintah juga telah menjadi paradoks baru di Thailand.

Hal tersebut menguatkan keinginan penulis untuk menulis riset ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat reformasi monarki serta rekonstitusi demokrasi yang sudah disuarakan rakyat Thailand dalam dua tahun terakhir namun diabaikan oleh para penguasa.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu: Bagaimana proses kemunduran demokrasi di Thailand sampai terjadinya unjuk rasa Gerakan Pro-Demokrasi tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses reformasi monarki yang giat di suarakan oleh masyarakat Thailand selama dua tahun terakhir dan gerakan rakyat pro-demokrasi dalam polemic reformasi Monarki di Thailand.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bisa diberikan baik untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat yang bisa dilihat secara teoritis maupun secara praktis. Terdapat dua manfaat yang ditujukan penulis kepada pembaca. Pertama, manfaat akademis. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dikarenakan masih sedikitnya penelitian terbaru mengenai perkembangan demokrasi di Thailand, penulis juga berharap para pembaca dapat meningkatkan kepedulian dan perhatian mereka terhadap politik di negara-negara ASEAN seperti Thailand setelah membaca tulisan ini.

Adapun harapan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi yang memberi perhatian lebih kepada topik terkait. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat menjadi referensi akademis dari dampak yang akan di timbulkan dalam masyarakat Thailand dalam konsolidasi demokrasi yang sedang terjadi dalam waktu beberapa belakangan ini. Penggunaan teori demokrasi representatif dalam memahami penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional.

Kedua, manfaat praktis. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan dan memperluas wawasan pengetahuan pada para penelaah, pengetahuan ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan seperti bisa digunakan oleh para mahasiswa, para dosen, dan juga oleh masyarakat pada kebanyakan. Serta menjadi bahan data tumpuan dan informasi dalam sasaran pertimbangan untuk penelitian-penelitian berikutnya dengan masalah yang serupa.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Moloeng, 2012). Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu menjabarkan temuan atau fenomena, menyajikan apa adanya sesuai fakta atau temuan di lapangan.

Serta mendefinisikan dan membatasi masalah agar lebih fokus dan memiliki ketajaman Analisa (Tobing, et al, 2016). Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam skripsi ini dianggap sangat tepat, sebab penelitian mengenai reformasi monarki adalah bentuk gejala fenomena politik yang dapat diteliti secara runtut dan dapat ditelusuri dengan demokrasi representatif yang bisa dijawab secara ilmiah.

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang baik pastinya akan memerlukan manajemen yang baik. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif berguna mencapai tujuan penelitian secara efektif dan efisien. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam metode kualitatif juga mengandalkan peneliti itu sendiri.

Pada umumnya penelitian kualitatif tidak amat sangat berfokus kepada angka dan nilai untuk melakukan pengukuran variabelnya dan cenderung bersifat elaborasi. Teknik pendekatan dan pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini tidak terstruktur dan tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu. Sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulisty Basuki (2006) ialah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

Imam Gunawan (2013) menyatakan bahwa, metode kualitatif merupakan suatu bentuk usaha untuk memahami dan menafsirkan peristiwa didalam interaksi manusia dalam beberapa situasi sesuai dengan perspektif peneliti itu sendiri yang dilakukan untuk memahami obyek penelitian sedalam-dalamnya. Teori yang dibangun dalam penelitian kualitatif juga didasarkan oleh data yang ada.

Berbanding terbalik dengan jenis penelitian kuantitatif, jenis analisa yang dilakukan secara kualitatif mempersilahkan peneliti untuk mencari informasi terkait penelitian sedalam-dalamnya dan tidak diharuskan untuk mendasari penelitian dengan prosedur statistik. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Soegiyono (2017) dalam Workshop mengenai Metode Penelitian perbedaan metode penelitian secara kualitatif dan kuantitatif adalah, "Penelitian kualitatif pada dasarnya diawali tidak harus melalui masalah, tetapi

dapat melalui potensi, keingintahuan, pertanyaan penelitian sedangkan penelitian kuantitatif harus berlandaskan masalah.” Didasari dengan pola rumusan masalah dalam riset, penulisan ini digolongkan dalam tipe penelitian secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang sifatnya faktual, penelitian deskriptif juga digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti sesuai dengan kondisi dan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu yang cukup untuk menggambarkan hubungan variabel orang, tempat, dan waktu. Furchan (2004) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada peraturan atau struktur yang diberikan ataupun uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian. Sedangkan menurut Punaji (2010) penelitian deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa sosial maupun alam dengan sangat spesifik. Dari kekhususan penggunaan teori ini juga yang menjadikan alasan kuat bahwa penelitian deskriptif dapat menggunakan data numerik yang seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif dan bisa juga mengandalkan teori-teori dan kata-kata seperti penelitian kualitatif.

Penelitian diskriptif analitik yang akan disajikan dalam judul “Polemik Reformasi Monarki Thailand: Tuntutan Rakyat Pro-Demokrasi” menilik dari gejala sosial yang sedang mewabah. Peneliti ingin permasalahan tersebut tetap berjalan secara alamiah sekaligus melihat proses serta dampak yang ditimbulkan.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset dianggap baik apabila data yang dihasilkan juga lengkap. Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian juga dapat ditemukan dari berbagai macam sumber. Pada umumnya, sumber dan teknik pengumpulan data dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu, sumber primer atau yang dikenal sebagai data langsung dan sumber sekunder atau yang dikenal sebagai data tidak langsung.

Melalui pengertian-pengertian para ahli mengenai sumber dan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian, penulis akan mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Menurut Hasan (2002), data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan orang yang bersangkutan dalam keperluan peneliti melengkapkan data yang diperlukan.

Data primer cenderung diperoleh dari pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh para peneliti dengan metode kuantitatif, berdasarkan pengamatan peneliti ke tempat terkait, atau juga dari data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber secara langsung. Dalam tulisannya, Hasan berpendapat bahwa data primer memiliki tiga elemen antara lain; catatan hasil wawancara; hasil observasi; data-data mengenai informan.

Sedangkan data sekunder adalah teknik pengumpulan data oleh peneliti yang diperoleh dari olahan data yang telah dikelola pihak lain. Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari sumber data sekunder adalah sebagai berikut, “Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai artian dan tujuan kedua jenis sumber dan teknik pengumpulan data peneliti akan berupaya untuk mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan hasil survei terdahulu yang dipublikasi ataupun tidak, analisis- analisis oleh para ahli, maupun mengambil data dari surat kabar atau majalah populer yang sudah di publikasi. Selain itu, teknik pengumpulan data juga penting adanya. Maka dari itu peneliti juga akan menggunakan teknik yang sesuai dalam segala proses mengumpulkan data.

Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dimana peneliti akan mengumpulkan data secara tidak langsung dalam kegiatan atau proses yang akan diamati melalui studi pustaka dimana peneliti menggunakan teknik ini untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai pedoman peneliti selama melakukan penelitian.

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Sekunder	Dokumentasi	(a) Observasi (b) Pengamatan mengenai sejarah politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir (c) Pengamatan perihal demonstrasi yang rutin dilakukan oleh rakyat Thailand untuk memperjuangkan demokrasi dan reformasi monarki Thailand. (d) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang demokrasi di Thailand yang mengalami kemunduran (e) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah tentang tuntutan hak asasi manusia di Thailand (f) Penelaahan dan pencatatan isi website resmi di internet tentang perkembangan kondisi di Thailand perihal studikamus yang terkait	(a) Data terkait kondisi politik Thailand (b) Data terkait kondisi masyarakat pro-demokrasi di Thailand (c) Data terkait realisasi kemajuan demokrasi yang dituntut oleh rakyat Thailand (d) Data terkait tentang demonstrasi yang dilakukan ditengah pandemik (e) Data terkait kondisi aktivis yang hilang karena menyuarakan pendapatnya/kritikan terhadap pemerintah (f) Data terkait Konstitusi Thailand

Sumber : Diolah Penulis

1.5.3. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif pastinya tidak akan lepas dari kata-kata obyektifitas, reliabilitas, maupun validitas. Untuk memperkuat paragraf argumen yang peneliti anggap benar, maka pencarian-pencarian data yang benar diperlukan untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Untuk dianggap benar atau tidaknya suatu data dalam penelitian perlu adanya pengujian terhadap data untuk mengukur kebenaran, kesempurnaan, keabsahan, dan kepercayaan suatu data.

Pada penelitian kualitatif, validasi data merupakan tujuan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengkaitkan tujuan dan lingkungan penelitian yang sedang dibuat. Sebagaimana dengan tulisan Bachtiar S. Bachri (2010), validasi data merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal yaitu, deskriptif, interpretasi, dan teori dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 244), data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Jika penelitian yang dilakukan seorang peneliti berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya maka penelitian itu dianggap tidak valid. Maka dari itu, penulis akan memvalidasi data penelitian ini melalui triangulasi data dimana pengujian kredibilitas penelitian ini diambil dari berbagai macam cara dari beragam waktu.

Dengan begitu, data yang penulis peroleh dari berbagai sumber akan penulis deskripsikan dan kategorikan sampai akhirnya penulis menulis kesimpulan diakhir tulisan untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2009: 244) analisis data menurut Bogdan adalah proses pencarian dan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dan diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber, catatan lapangan, maupun bahan lainnya yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kembali pada orang lain.

Sedangkan menurut Moeleong (2017, 280) teknik analisis data adalah proses penyaringan data atau pengurutan data ke dalam beberapa kategori dan pola. Dari perumusan itulah dapat ditemukan hipotesis kerja yang dikelola dari data yang ada. Dari beberapa pengertian menurut ahli dapat disimpulkan bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data-data yang didapat sehingga mempermudah peneliti untuk memahami data menjadi acuan yang lebih rinci.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna membahas permasalahan yang lebih mendalam, penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab utama. Didalam bab tersebut juga terdapat beberapa sub-bab yang ditulis untuk menyesuaikan pembahasan yang ada dalam riset ini. Bab 1 (satu) merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 (dua) adalah kajian Pustaka yang terdiri atas tinjauan Pustaka, kerangka teoritik, kerangkak pemikiran, dan hipotesis.

Bab 3 (tiga) berisikan pembahasan mengenai akar permasalahan keterhambatan reformasi monarki di Thailand yang mengakibatkan munculnya gerakan sosial yang tersebar luas melalui platform digital secara kritis mengenai jalannya pemerintahan Thailand itu sendiri. Bab 4 (empat) merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.